



## Perubahan Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Berapi

### *Changing of Community Preparedness to Cope Volcanic Disaster Eruption*

Siti Hadiyati Nur Hafida\*

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Diterima: 09 Juli 2019; Disetujui: 17 September 2019; Dipublish: 03 Desember 2019

---

#### Abstrak

Bencana merupakan hal yang selalu terjadi di Indonesia. Banyaknya kejadian bencana di Indonesia seharusnya diimbangi dengan tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang baik. Tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana mampu mendorong berubahnya paradigma bencana di masyarakat. Masyarakat seringkali hanya merespon kejadian bencana dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi namun, upaya tersebut masih saja belum mampu meminimalkan korban bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan memperhatikan lima variabel kesiapsiagaan bencana, yaitu: pengetahuan bencana, kebijakan bencana, rencana kesiapsiagaan bencana, sistem peringatan dini dan kemampuan mobilisasi sumber daya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidorejo telah mengembangkan paradigma bencana kearah pencegahan dengan memanfaatkan infrastruktur radio komunitas. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diikuti dengan adanya penggunaan infrastruktur radio komunitas mampu mendorong masyarakat Desa Sidorejo untuk lebih siap dan tidak mudah panik saat situasi bencana. Infrastruktur berbasis masyarakat akan lebih efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan masyarakat karena masyarakatlah yang mengelola infrastruktur tersebut.

**Kata Kunci:** Kesiapan Masyarakat, Bencana, Erupsi, Radio Komunitas

#### Abstract

*Disasters are things that always happen in Indonesia. The number of disasters in Indonesia should be balanced with the level of community preparedness in the face of disasters. The level of community readiness in dealing with disasters can drive the change in the disaster paradigm in society. Communities often only respond to disaster events with rehabilitation and reconstruction efforts, however, these efforts still cannot afford to minimize disaster victims. This study aims to determine changes in community preparedness in the cope of disasters of volcanic eruptions. This study used qualitative analysis by considering five variables of disaster preparedness, specifically: disaster knowledge, disaster policy, disaster preparedness plans, early warning systems and resource mobilization capabilities. This research was conducted using interview. The results showed that the community of Sidorejo Village had developed a disaster paradigm towards prevention by utilizing community radio infrastructure. The readiness of the community to deal with disasters followed using community radio infrastructure is able to encourage the people of Sidorejo Village to be better prepared and not easily panic during a disaster. Community-based infrastructure will be more effectively used to improve community preparedness because the community manages the infrastructure.*

**Keywords:** Community Preparedness, Disaster, Eruption, Community Radio

**How to Cite:** Hafida, S.H.N. (2019). Perubahan Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Berapi. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*: 11 (2) 396-407.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [shnh421@ums.ac.id](mailto:shnh421@ums.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Bencana alam merupakan bencana yang seringkali terjadi di wilayah Indonesia. Kondisi geografis wilayah Indonesia pada akhirnya mendorong Indonesia sebagai 'supermarket bencana'. Berbagai jenis bencana terdapat di Indonesia, baik bencana geologis maupun bencana ekologis. Bencana geologis seringkali berakibat pada semakin banyaknya korban bencana. Hal tersebut disebabkan karena bencana geologis tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya.

Erupsi gunung berapi merupakan salah satu jenis bencana geologis yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik sehingga di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah gunung berapi paling banyak, sekitar 35 gunung berapi (Direktorat Vulkanologis dalam Banowati, 2012). Salah satu gunung berapi yang paling aktif di Pulau Jawa adalah Gunung Berapi Merapi.

Gunung Berapi Merapi memiliki siklus erupsi sekitar 4 – 8 tahun. Intensitas erupsi tersebut seharusnya mampu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semakin siap dalam menghadapi bencana namun pada tahun 2010, korban jiwa akibat bencana erupsi Gunung Berapi Merapi mencapai 353 jiwa. Masih

banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana semakin mendorong kerentanan bencana di wilayah lereng Gunung Berapi Merapi semakin besar. Kerentanan bencana dapat diminimalisir jika masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana memiliki tingkat kesiapsiagaan bencana yang tinggi.

Kesiapsiagaan masyarakat merupakan hal penting dalam menghadapi bencana. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat telah menyadari bahwa bencana adalah kejadian alam, bukan kehendak Tuhan (Shaluf, 2007). Jika masyarakat memiliki tingkat kesiapsiagaan bencana yang tinggi maka dampak bencana dapat diminimalisir, begitu juga sebaliknya, tingkat kesiapsiagaan bencana yang rendah akan mendorong semakin besarnya dampak bencana. Suatu wilayah dengan tingkat bahaya dan kerentanan yang tinggi namun, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana juga tinggi maka dampak dari bencana tersebut akan dapat ditekan (Mukti dalam Indiyanto, 2012).

Kesiapsiagaan bencana menunjukkan bahwa masyarakat mampu meningkatkan kapasitas yang dimilikinya untuk menghadapi bencana (Sena, Lelisa and Kifle W/Michael, 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban, kerugian harta benda bahkan berubahnya tata kehidupan di masyarakat.

Kesiapsiagaan bencana masyarakat di Indonesia masih sangat lemah (Rinaldi, 2009). Kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggungjawab dari pihak pemerintah, kesiapsiagaan bencana justru lebih mengarah kepada tanggungjawab setiap individu atau masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat kesiapsiagaan bencana tinggi akan lebih kuat dalam menghadapi bencana, sedangkan masyarakat yang tingkat kesiapsiagaannya rendah maka akan lebih rentan dalam menghadapi bencana.

Mekanisme masyarakat dalam menghadapi bencana terbentuk melalui pengalaman, pengetahuan, pemahaman dan pemaknaan dari setiap kejadian yang ada di sekitarnya (Maarif, 2012). Kesiapsiagaan bencana akan berkaitan erat dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Salah satu hal yang dapat meningkatkan kesadaran adalah perubahan sikap dan penilaian

seseorang terhadap suatu hal (Sternberg, 2006). Proses penilaian ini sangat erat kaitannya dengan persepsi (Worchel, Cooper and Goethals, 1991). Perubahan persepsi atau penilaian sangat berkaitan dengan meningkatnya pengetahuan atau adanya informasi baru yang mengacu pada perubahan kesadaran. Salah satu cara peningkatan kesadaran adalah dengan mengubah pengetahuan seseorang terhadap suatu hal (Duval & Lawani, 1999; Silvia & Duval, 2001).

Karanci dan Acarturk (2005) menyatakan bahwa pengalaman menghadapi peristiwa traumatis dapat menumbuhkan energi baru dalam belajar dan membuat pergerakan signifikan menuju perubahan kepada perspektif arah yang baru, yang dapat diterapkan pada perubahan yang cepat dari kondisi "menunggu bantuan" menuju "berdiri untuk bangkit kembali". Perubahan kesiapsiagaan bencana oleh masyarakat akan berkaitan erat dengan perubahan paradigma bencana di masyarakat. Masyarakat yang semakin siap dalam menghadapi bencana akan lebih berfokus pada upaya-upaya pencegahan dibandingkan respon (Ramadhan & Matondang, 2016)..

Kesiapsiagaan bencana dapat diketahui dengan mengukur beberapa elemen kesiapsiagaan, antara lain:

pengetahuan bencana, kebijakan bencana, rencana kesiapsiagaan bencana, sistem peringatan dini dan kemampuan mobilisasi sumber daya (LIPI, 2006). Pengetahuan tentang bencana merupakan alasan utama bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan bahaya, dampak dan kerentanan yang ada (Jeannette Sutton and Kathleen Tierney, 2006). Pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana alam (Hidayati, dkk, 2006).

Kebijakan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana (LIPI, 2006). Kebijakan bencana akan berkaitan dengan rencana kesiapsiagaan bencana. Rencana kesiapsiagaan bencana akan melibatkan beberapa hal, yaitu: identifikasi sumber daya atau organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, kebijakan terkait bencana dan perencanaan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*, 2000). Rencana kesiapsiagaan bencana akan efektif untuk meningkatkan

kesiapsiagaan bencana jika didukung dengan adanya sistem peringatan dini yang baik.

Sistem peringatan dini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi korban jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan akibat bencana (Deny Hidayati dkk, 2006). Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana harus mampu memanfaatkan sistem peringatan dini yang ada di wilayahnya. Kemampuan memobilisasi sumber daya merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam upaya penanggulangan bencana, baik sumber daya manusia (kapasitas masyarakat), modal/pendanaan dan sarana prasarana.

Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang berada di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Berapi Merapi. Letaknya yang hanya berjarak  $\pm 5$  km dari puncak Gunung Berapi Merapi menjadikan wilayah ini memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Tingginya risiko bencana yang ada ternyata mampu diminimalisir oleh masyarakat sehingga pada bencana erupsi Gunung Berapi Merapi tahun 2010, masyarakat di Desa Sidorejo tidak ada yang menjadi korban bencana erupsi.

Masyarakat di Desa Sidorejo sudah mampu berpartisipasi dalam manajemen bencana. Adanya partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Perubahan kesiapsiagaan bencana yang terjadi di Desa Sidorejo seharusnya dapat diaplikasikan di wilayah lain yang memiliki risiko bencana.

### **METODE PENELITIAN**

Studi yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perubahan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Berapi Merapi. Diskusi terhadap tujuan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa seperti lokasi penelitian sehingga masyarakat akan lebih siap terhadap bencana yang ada.

Identifikasi perubahan kesiapan masyarakat dilakukan dengan pendekatan pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini perubahan kesiapan masyarakat diukur dengan membandingkan kesiapan masyarakat pada tahun 2006 dan 2010 dalam menghadapi bencana, dengan fokus utama pada pengetahuan bencana, kebijakan bencana, rencana kesiapsiagaan bencana, sistem peringatan dini dan mobilisasi sumber daya. Analisis yang digunakan

untuk mengukur perubahan kesiapan masyarakat dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun proses analisis yang digunakan dilakukan dengan mengidentifikasi pengetahuan bencana masyarakat. Sub variabel terkait pengetahuan bencana antara lain: pemahaman bencana, pemahaman tindakan penyelamatan diri, dan sikap atau kepedulian terhadap risiko bencana. Setelah mengidentifikasi pengetahuan bencana, selanjutnya mengidentifikasi kebijakan bencana. Analisis kebijakan bencana dilakukan untuk mengetahui sikap dan tindakan penyelamatan diri, peralatan yang dibutuhkan, dan kebijakan bencana.

Aspek lain yang digunakan dalam analisis adalah kesiapsiagaan bencana masyarakat. Rencana kesiapsiagaan akan melibatkan beberapa hal, yaitu: identifikasi sumber daya atau organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, dan perencanaan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Peringatan dini merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Dalam peringatan dini akan dianalisis mengenai persepsi masyarakat terhadap peringatan, pengalaman masyarakat

terkait peringatan bencana di masa lalu dan keyakinan serta sikap masyarakat terhadap sistem peringatan dini yang ada.

Mobilisasi sumber daya juga menjadi aspek yang perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Mobilisasi sumber daya akan berkaitan dengan keterampilan bencana masyarakat, pelatihan yang pernah diikuti, alokasi dana untuk menghadapi bencana dan kesepakatan keluarga untuk memantau peralatan siaga bencana secara reguler.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengetahuan Bencana**

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Sidorejo memiliki pengetahuan bencana yang baik, hal tersebut disebabkan masyarakat yang berada di Desa Sidorejo merupakan masyarakat asli Desa Sidorejo sehingga masyarakat sudah sering mengalami bencana erupsi. Sumber pengetahuan yang berupa pengalaman mampu mendorong meningkatnya pemahaman bencana pada masyarakat. Masyarakat paham bahwa bencana merupakan kejadian merusak yang mampu mengganggu aktivitas masyarakat namun, pada tahun 2006, masyarakat belum mampu memahami tindakan penyelamatan diri saat situasi bencana. Masyarakat masih sangat terpaku dengan sistem informasi bencana dari

pihak pemerintah, padahal informasi tersebut seringkali diterima terlambat oleh masyarakat.

Masyarakat di kawasan rawan bencana yang seharusnya mendapatkan informasi bencana justru terlambat menerimanya, sedangkan masyarakat di kawasan non rawan bencana dengan cepat memperoleh informasi bencana tersebut. Lambatnya informasi yang diterima akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menyelamatkan diri. Semakin cepat informasi bencana yang diterima oleh masyarakat maka masyarakat akan semakin cepat pula untuk menyelamatkan diri, begitu pula sebaliknya, semakin lambat informasi bencana maka masyarakat akan semakin lambat untuk menyelamatkan diri.

Tabel 1. Identifikasi Pengetahuan Bencana

| Aspek  | Tahun 2006  | Tahun 2010   |
|--|---|--|
| Pemahaman bencana                            | Baik, karena masyarakat sering menjadi korban bencana.  | Baik, karena masyarakat sering menjadi korban bencana.   |
| Pemahaman tindakan penyelamatan diri         | Belum memahami tindakan penyelamatan diri dan sangat bergantung terhadap informasi bencana dari pihak pemerintah. | Mendirikan radio komunitas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan upaya penyelamatan diri |
| Sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana | Hanya mementingkan mitigasi struktural  | Mulai memperhatikan mitigasi non struktural sebagai pendukung mitigasi struktural              |

Sumber: Peneliti, 2017

Pada tahun 2010, masyarakat sudah mampu menentukan tindakan penyelamatan diri berbasis masyarakat. Masyarakat Desa Sidorejo memanfaatkan radio komunitas Lintas Merapi FM sebagai media untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan swasta mengenai tindakan penyelamatan bencana. Adanya infrastruktur radio komunitas sangat membantu masyarakat karena seringkali infrastruktur komunikasi akan mengalami gangguan saat situasi bencana, hanya radio yang masih dapat dimanfaatkan saat situasi bencana.

Masyarakat Desa Sidorejo tidak lagi hanya mementingkan mitigasi struktural namun juga mitigasi non struktural. Masyarakat mengetahui bahwa wilayahnya merupakan daerah yang rawan bencana sehingga sikap dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya menjadi semakin baik. Ketika terjadi tanda-tanda bencana, masyarakat akan langsung menyebarluaskan kondisi tersebut ke masyarakat lain. Tingginya kepedulian masyarakat terhadap kondisi sekitar mampu mendorong semakin meminimalisir korban bencana.

### **Kebijakan Bencana**

Masyarakat Desa Sidorejo pada tahun 2006, belum memiliki mekanisme

penyelamatan diri. Pada saat situasi bencana, masyarakat mudah merasa panik dan bingung, masyarakat tidak tahu harus kemana dan bagaimana caranya. Masyarakat hanya mengikuti arahan dari pihak pemerintah, bahkan beberapa masyarakat belum memperhatikan keselamatan diri dan keluarganya. Beberapa masyarakat tersebut masih mengutamakan harta benda saat situasi bencana, sehingga proses evakuasi bencana sulit untuk dilakukan.

Masyarakat masih sangat bergantung terhadap mitos dan budaya yang ada di wilayahnya. Masyarakat menganggap bahwa mereka lebih mengetahui kondisi Gunung Berapi Merapi sehingga, masyarakat tidak memiliki peralatan siaga bencana. Saat situasi bencana, masyarakat sepenuhnya mengandalkan bantuan peralatan dari pihak pemerintah atau swasta. Meskipun seringkali bantuan peralatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena rendahnya kapasitas masyarakat.

Tabel 2. Identifikasi Kebijakan Bencana

| Aspek                                | Tahun 2006   | Tahun 2010   |
|--------------------------------------|--|--|
| Pemahaman bencana                    | Baik, karena masyarakat sering menjadi korban bencana.                   | Baik, karena masyarakat sering menjadi korban bencana.                 |
| Pemahaman tindakan penyelamatan diri | Belum memahami tindakan penyelamatan diri dan sangat bergantung terhadap | Mendirikan radio komunitas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan |

Sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana

informasi bencana dari pihak pemerintah. Hanya mementingkan mitigasi struktural

upaya penyelamatan diri Mulai memperhatikan mitigasi struktural sebagai pendukung mitigasi struktural

media massa seringkali merupakan informasi bencana palsu. Adanya kepercayaan yang tinggi terhadap informasi bencana di media masa mendorong masyarakat untuk semakin panik dalam menghadapi bencana di tahun 2006. Masyarakat tidak tahu harus berkoordinasi dengan siapa saat situasi bencana terjadi sehingga, pembagian peran dan tanggung jawab saat situasi bencana sangat tidak terorganisir dan bersifat spontan.

Sumber: Peneliti, 2017

Pada tahun 2010, masyarakat sudah memahami dengan baik mekanisme penyelamatan diri, masyarakat harus mengutamakan keselamatan diri dan keluarganya dibandingkan harta bendanya. Perubahan sikap dan tindakan penyelamatan diri ini sangat efektif membantu masyarakat saat evakuasi bencana. Masyarakat akan mudah untuk menyelamatkan diri dan keluarganya karena tidak dibebani dengan harta benda yang dimilikinya. Perubahan sikap ini mampu mendorong masyarakat untuk semakin terbuka dengan perkembangan teknologi yang ada. Masyarakat mengetahui bahwa infrastruktur dapat menjadi salah satu sarana untuk meminimalkan dampak bencana oleh sebab itu, masyarakat mulai membangun dan mengelola radio komunitas sebagai bagian dari peralatan siaga bencana.

### **Rencana Kesiapsiagaan Bencana**

Masyarakat sangat mempercayai dan mengikuti informasi bencana yang ada. Padahal informasi bencana yang ada di

Berbeda dengan kondisi masyarakat pada tahun 2010, masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana karena masyarakat telah mengelola infrastruktur bencana berbasis masyarakat. Infrastruktur berbasis masyarakat akan lebih mudah untuk dipercaya isi informasinya, masyarakat mengetahui kondisi di wilayahnya dengan baik sehingga masyarakat tidak akan menyebarkan informasi palsu. Dengan adanya infrastruktur tersebut maka masyarakat Desa Sidorejo secara tidak langsung juga membentuk organisasi bencana dengan lebih terorganisir.

Organisasi bencana membantu masyarakat untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah, sehingga saat situasi bencana masyarakat mampu lebih siap dan mengetahui peran dan tugasnya masing-masing. Perubahan

sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu merencanakan kegiatan bencana dengan lebih baik. Masyarakat mampu berkoordinasi terkait lokasi evakuasi, rambu-rambu evakuasi bahkan peralatan siaga bencana yang harus dimiliki oleh setiap keluarga.

Tabel 3. Identifikasi Rencana Kesiapsiagaan Bencana

| Aspek                               | Tahun 2006  | Tahun 2010   |
|-------------------------------------|---|--|
| Identifikasi sumber daya individu   | Belum siap menghadapi bencana.  | Siap menghadapi bencana.   |
| Identifikasi sumber daya organisasi | Belum ada struktur organisasi bencana yang jelas. Skema komunikasi dan koordinasi bersifat spontan dan tidak terstruktur.               | Memiliki struktur organisasi bencana yang jelas. Skema komunikasi dan koordinasi lebih terstruktur dan jelas.                      |
| Pembagian peran dan tanggung jawab  | Peran dan tanggung jawab tidak terorganisir dan bersifat spontan.   | Peran dan tanggung jawab terorganisir sesuai dengan kemampuan setiap individu.   |
| Perencanaan kegiatan bencana        | Lokasi evakuasi belum terorganisir. Tidak terdapat rambu-rambu evakuasi bencana. Setiap keluarga tidak memiliki peralatan siaga bencana | Lokasi evakuasi sudah tersedia. Terdapat rambu-rambu evakuasi bencana. Peralatan siaga bencana sudah dimiliki oleh setiap keluarga |

Sumber: Peneliti, 2017

### Sistem Peringatan Dini

Pada awal pendirian infrastruktur radio komunitas sebagai sarana peringatan bencana, masyarakat beranggapan bahwa infrastruktur tersebut tidak penting. Masyarakat tidak ingin terlibat dalam pengelolaan infrastruktur tersebut karena masyarakat lebih mempercayai isi informasi bencana yang ada di media massa. Kepercayaan masyarakat terhadap media massa yang tinggi ini pada akhirnya membuat masyarakat tidak memiliki mekanisme peringatan bencana. Jika informasi di media massa menyatakan bahwa masyarakat harus mengungsi maka masyarakat akan langsung mengungsi. Hal tersebut membuat masyarakat semakin panik dan tidak siap dalam menghadapi bencana.

Saat situasi bencana, masyarakat hanya memanfaatkan peralatan tradisional untuk menyebarkan informasi bencana, seperti: kenthongan. Peralatan tradisional tersebut memiliki kelemahan tidak mampu menjangkau wilayah luas, sehingga seringkali masyarakat yang berada jauh dari lokasi tidak mengetahui informasi tersebut. Berbeda dengan kondisi masyarakat pada tahun 2010, masyarakat mampu memanfaatkan peralatan yang lebih modern untuk menyebarkan informasi bencana. Peralatan tersebut berupa *Handy Talky* (HT) dan radio komunitas.

HT dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan informasi bencana kepada pengelola radio komunitas, kemudian pengelola radio komunitas akan menyalurkan informasi bencana tersebut melalui siaran radio. Pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana mendorong masyarakat untuk bersikap positif terhadap pengelolaan radio komunitas. Masyarakat tidak lagi mempercayai informasi bencana dari media massa dan lebih mempercayai informasi bencana dari radio komunitas. Adaptasi masyarakat terhadap radio komunitas menunjukkan bahwa masyarakat telah mengembangkan sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat, yang berupa radio komunitas.

Tabel 4. Identifikasi Sistem Peringatan Dini

| Aspek  | Tahun 2006   | Tahun 2010  |
|--|--|---|
| Persepsi masyarakat terhadap peringatan bencana  | Skeptis terhadap peringatan bencana.   | Memberikan respon positif terhadap sistem peringatan dini.  |
| Pengalaman masyarakat terkait peringatan bencana | Peringatan bencana menggunakan sistem yang bersifat tradisional. Belum ada mekanisme peringatan bencana. | Sistem peringatan dini yang ada sudah canggih. Memiliki mekanisme peringatan bencana berbasis masyarakat. |
| Keyakinan dan sikap terhadap peringatan bencana  | Tidak mengikuti informasi dari alat peringatan bencana   | Mampu beradaptasi dengan sistem peringatan dini yang ada  |

Sumber: Peneliti, 2017

### **Mobilisasi Sumber Daya**

Pada tahun 2006 di Desa Sidorejo belum memiliki tim penanggulangan bencana karena masyarakat masih sangat bergantung terhadap informasi bencana di media massa. Tidak adanya tim penanggulangan bencana menunjukkan bahwa keterampilan bencana masyarakat sangat terbatas. Masyarakat tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi, masyarakat hanya bersikap reaktif terhadap bencana.

Adanya sikap reaktif terhadap bencana mendorong masyarakat untuk enggan mengikuti pelatihan kebencanaan, hanya sedikit masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan bencana. Pemahaman yang rendah tersebut membuat masyarakat tidak siap dalam menghadapi bencana, masyarakat tidak memiliki alokasi dana khusus saat situasi bencana. Oleh karena itu, masyarakat harus membangun ulang dari awal saat kondisi pasca bencana.

Tabel 5. Identifikasi Mobilisasi Sumber Daya

| Aspek                           | Tahun 2006  | Tahun 2010  |
|---------------------------------|---|---|
| Keterampilan bencana masyarakat | Belum terdapat tim penanggulangan bencana di masyarakat.  | Sudah terdapat tim penanggulangan bencana.  |
| Pelatihan                       | Keterampilan bencana sangat terbatas. Bersifat responsif atau reaktif terhadap bencana. Pasif terkait | Keterampilan bencana sudah baik (manajerial, sosial, ekonomi dll). Bersifat antisipatif dan reaktif terhadap bencana. Aktif mengikuti |

|   |   |  |
|---|---|--|
| bencana yang pernah diikuti                                 | pelatihan bencana.  | pelatihan bencana.   |
| Alokasi dana untuk menghadapi bencana                       | Tidak menyediakan alokasi dana untuk menghadapi bencana.  | Menyediakan alokasi dana untuk menghadapi bencana.                   |
| Kesepakatan keluarga untuk mengecek peralatan siaga bencana | Belum ada kesepakatan penggunaan peralatan siaga bencana. | Terdapat kesepakatan untuk mengecek kondisi peralatan siaga bencana. |

Sumber: Peneliti, 2017

Terjadi perubahan kesiapsiagaan bencana pada tahun 2010. Masyarakat Desa Sidorejo sudah mengetahui dampak dari bencana sehingga masyarakat mulai membentuk tim penanggulangan bencana. Tim penanggulangan bencana akan mengikuti pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dan setelah mengikuti pelatihan tersebut, tim penanggulangan bencana akan menyalurkan pengetahuan dan kemampuan yang didapatkannya kepada masyarakat. Kemampuan kebencanaan ditunjukkan dengan adanya alokasi dana khusus yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sidorejo, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisinya pada saat pasca bencana.

## SIMPULAN

Perubahan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana mampu

mendorong masyarakat untuk semakin tangguh dalam menghadapi bencana. Perubahan kesiapan masyarakat juga akan berakibat pada perubahan paradigma bencana oleh masyarakat. Masyarakat tidak hanya memperhatikan respon terhadap bencana namun, masyarakat mampu mempersiapkan kondisi pencegahan bencana melalui penyediaan infrastruktur pendukung bencana, seperti adanya infrastruktur radio komunitas. Penyediaan infrastruktur tersebut mampu mendorong masyarakat untuk semakin terbuka terhadap perkembangan teknologi saat situasi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banowati, E. (2012). Geografi Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Duval, S.T & Lalwani N. (1999) Objective Self-Awareness and Causal Attribution for Self-Standard Discrepancies: Changing Self or Changing Standards of Correctness. *Pers Soc Psychol Bull*, 25 (10), 1220-1229.
- Hidayati, D. dkk. (2006). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. LIPI-UNESCO/ISDR
- IFRC. (2011). *Characteristics of a Safe and Resilient Community. Community Based Disaster Risk Reduction Study*. Geneva: IFRC
- Indiyanto, A. & Kuswanjono, A. (2012). Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana. Bandung: Mizan Pustaka
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2000). *Introduction to Disaster Preparedness*
- Sternberg. J.R. (2006). *Cognitive Psychology Fourth Edition*. USA: Thomson Wads-Worth
- LIPI. (2006). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami di Indonesia. LIPI: Bandung,
- Maarif, S., Pramono, R., dkk. (2012). Kontestasi Pengetahuan dan Pemaknaan tentang Ancaman Bencana Alam. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 3(1), 1-13
- Ramadhan, I, & Matondang, A., (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah

- Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (2): 173-181.
- Rinaldi. (2009). Kesiapan Menghadapi Bencana pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14(1)
- S Worchel, Chooper J & Goethals R.G. (1991) *Understanding Social Psychology*. USA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Sena, L. & Michael, K.W. (2006). *Disaster Prevention and Preparedness*. Ethiopia: Jimma University and Ethiopia Public Health Training Initiative
- Shaluf, I.M.. (2007). Disaster Prevention and Management. *Disaster Types*, 16(5), 704-717.
- Sutton, J. and Tierney, K. (2006) *Disaster Preparedness: Concepts, Guidance, and Research*. Colorado: Natural Hazards Center Institute of Behavioral Science University of Colorado
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.